

**DINAMIKA KERJASAMA EKONOMI INDONESIA DENGAN
ANGGOTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM (OKI):
POTENSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA**

***The Dynamic Economic Cooperation between Indonesia and
the Members of Organization of the Islamic Conference (OIC):
Prospect and Impacts towards the Indonesian Economy***

Agus Syarip Hidayat

Peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Jl. Gatot Subroto Kav.10, Jakarta Selatan 12710

email: aa_gus@yahoo.com; agus067@lipi.go.id

Naskah diterima: 12/03/2015 Naskah direvisi: 23/07/2015 Disetujui diterbitkan: 11/01/2016

Abstrak

Sejak Organisasi Konferensi Islam (OKI) berdiri tahun 1969, kerjasama ekonomi antar anggotanya yang berjumlah 57 negara terbilang belum intensif. Salah satu indikasinya adalah rendahnya porsi *intra-trade* dan *intra-investment* OKI, serta pertumbuhan mereka yang juga relatif lambat. Penelitian ini membahas dinamika kerja sama ekonomi antara Indonesia dan anggota OKI serta prospek liberalisasi ekonomi OKI dan potensi dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Model yang digunakan adalah *standard Global Trade Analysis Project (GTAP)*. Analisis menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi OKI berpotensi memberikan dampak sektoral yang beragam bagi Indonesia, khususnya terlihat pada variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, output industri dan perdagangan. Indonesia dan anggota OKI lainnya dapat memperoleh manfaat optimal ketika diterapkan *full liberalization*. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil peran untuk mendorong percepatan dan pendalaman liberalisasi perdagangan yang lebih komprehensif antar anggota OKI. Sebagai langkah awal, Indonesia perlu segera meratifikasi perjanjian *Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conference (TPS-OIC)*.

Kata kunci: OKI, Liberalisasi Ekonomi, Dampak Bagi Perekonomian Indonesia

Abstract

Since the establishment of Organization of the Islamic Conference (OIC) in 1969, the level of economic cooperation among its 57 member-countries has been limited, indicated by the low portion of intra-trade and intra-investment among the OIC members and their relatively slow growth. This study discusses the dynamic economic cooperation between Indonesia and the OIC members. Further, it analyzes the prospect of OIC economic liberalization and its potential impacts on the Indonesian economy. It uses secondary data and employs the standard of General Trade Analysis Project (GTAP) model. It shows that the OIC economic liberalization potentially had varying sectoral impacts on Indonesian economy, which was particularly shown by macroeconomic variables (such as economic growth and inflation), industrial output, and trade. Furthermore, Indonesia and other OIC members would obtain optimum benefits when full liberalization is applied.

Keywords: OIC, Economic Liberalization, Impacts on Indonesia Economy

JEL Classification: F13, F14, F15, F17, F62

PENDAHULUAN

Dengan pemberlakuan *Agreement on Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conference (TPS-OIC)* secara lengkap pada tahun 2012, maka kerjasama ekonomi antar negara OKI berpotensi semakin meningkat. Ada tiga komponen utama dalam kerjasama TPS, yaitu kerangka kerjasama (*The Framework Agreement*); *The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS)* dan aturan asal barang (*Rules of Origin / RoO*). Kerangka kerjasama TPS-OIC mulai diberlakukan tahun 2002. Sementara PRETAS diimplementasikan pada Februari 2010. Selanjutnya perjanjian aturan asal barang telah disepakati untuk dimulai pada Agustus 2012.

Pendalaman kerangka kerjasama dalam bingkai TPS-OIC diharapkan menjadi titik balik untuk membangun kerjasama ekonomi yang semakin mendalam antar anggota OKI. Hal ini sangat penting mengingat sejauh ini kerjasama ekonomi, sosial dan keamanan dalam bingkai OKI masih terbelang tradisional dan tertinggal dibandingkan blok kerjasama ekonomi lain (Hossain, 2012). Hal ini salah satunya bisa dilihat dari porsi *intra trade* OKI yang rendah dengan pertumbuhan yang lambat. Pergerakan investasi antar negara OKI pun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hassan (2002) menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya *intra trade* dalam OKI yaitu rendahnya perdagangan yang terkait dengan jasa, minimnya informasi perdagangan antar anggota OKI, hambatan tarif serta non-tarif yang tinggi.

Kerjasama ekonomi antar anggota OKI yang masih rendah ini diperparah oleh sistem perekonomian beberapa negara OKI yang masih diklasifikasikan sebagai perekonomian tertutup. Dengan menggunakan perhitungan rasio ekspor-impor terhadap GDP, Karam (2014) mengelompokkan anggota OKI ke dalam tiga kelompok yaitu *the most open economy* (terdiri dari Emirate Arab, Tajikistan, Guyana, Malaysia dan Bahrain), *closed economy* (Sudan, Niger, Pakistan, Bangladesh dan Djibouti) dan sisanya dikategorikan sebagai *the open economy*. Menurut data WTO (2013), sampai dengan September 2013 hanya 38 anggota OKI yang sudah bergabung menjadi anggota WTO, sementara sisanya sebagai *observers*.

Secara ekonomi, tingkat pembangunan diantara anggota OKI masih sangat beragam. Dengan indikator pendapatan perkapita, sebagian anggota OKI masuk dalam kategori negara maju (*developed countries*) dan berkembang (*developing countries*). Sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap negara tertinggal/miskin (*least developed countries*). Estes dan Tiliouini (2014) menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi di 27 negara Afrika yang menjadi anggota OKI. Sementara 23 negara anggota OKI di Asia juga masih menghadapi masalah kemiskinan walaupun tidak separah seperti yang terjadi di Afrika. Dalam kancah global, berdasarkan data IMF (2013a) diketahui bahwa pada tahun 2012 kontribusi anggota OKI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan *Purchasing*

Power Parity (PPP) dunia hanya sekitar 10,7%. Pendapatan perkapita anggota OKI beragam mulai dari USD 869 PPP - USD 102.768 PPP.

OKI sebenarnya mempunyai potensi untuk berperan dan lebih diperhitungkan dalam percaturan global. Kliman dan Fontaine (2012) menyebut dua negara anggota OKI yaitu Indonesia dan Turki (bersama dengan Brazil dan India) sebagai “*The Global Swing States*” yang diprediksi akan mempengaruhi tatanan ekonomi global saat ini dan di masa mendatang. Keempat negara tersebut akan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi dan menentukan pertumbuhan dan arah dari pergerakan perdagangan dan investasi internasional. Sebelumnya pada tahun 2011, Asian Development Bank (ADB). (2011) memperkirakan bahwa dua dari tujuh negara yang akan menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Asia pada tahun 2050 adalah Indonesia dan Malaysia, yang *notabene* keduanya adalah anggota OKI.

Mencermati latar belakang ini, maka penelitian ini mengulas dinamika kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara OKI. Pembahasan diawali dengan uraian tentang dinamika kerjasama investasi dan perdagangan. Selanjutnya analisis diarahkan untuk melihat sejauh mana dinamika kerjasama investasi dan perdagangan tersebut berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Bagian akhir mengulas tentang simulasi liberalisasi ekonomi dalam OKI dan potensi pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.

METODE

Simulasi potensi dampak ekonomi dari liberalisasi perdagangan negara-negara OKI dianalisis dengan *Computable General Equilibrium (CGE) model*. Model spesifik yang akan digunakan adalah model standar *Global Trade Analysis Project (GTAP)*. Simulasi hanya fokus pada liberalisasi perdagangan barang dan jasa dengan tarif sebagai *shock variabel*. Dalam model CGE GTAP standar yang dikembangkan oleh Hertel & Tsigas (1997) terdapat 98 persamaan matematik yang secara garis besar dikelompokkan ke dalam enam blok meliputi: (1) *Accounting relationship*; (2) *Price linkage*; (3) *Producer behavior*; (4) *Household behavior*; (5) *Global banking/investment* dan (6) *Global transportation*.

Simulasi liberalisasi perdagangan antar negara-negara OKI menggunakan dua skenario, yaitu *partial liberalization* dan *full liberalization*. Asumsi kedua simulasi ini sama yaitu (a) pasar dalam kondisi persaingan sempurna dalam faktor produksi dan produk yang diperdagangkan; (b) fungsi produksi bersifat *constant return to scale*. Pada skenario pertama (*partial liberalization*), diasumsikan bahwa terjadi penurunan tariff impor sebesar 50% dari *ad valorem tariff* yang berlaku di negara-negara OKI. Penurunan tarif ini hanya berlaku bagi sesama anggota OKI. Adapun negara lainnya diasumsikan tidak mengalami perubahan tarif. Adapun pada skenario kedua (*full liberalization*), simulasi dilakukan dengan penghapusan tarif sebesar 100%.

Analisis GTAP menggunakan GTAP database 8 dengan referensi data tahun 2007 dan disimulasikan dengan RunGTAP software versi 3.61. Agregasi ekonomi/negara dibagi menjadi 4 kelompok yaitu: Indonesia, D8¹ minus Indonesia (Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Mesir, Turki dan Nigeria),

negara-negara OKI minus D8, dan kelompok negara lainnya (*rest of the world*). Simulasi ini memasukkan semua sektor (57 sektor) sebagaimana tertuang dalam database GTAP dalam skema liberalisasi. Sektor-sektor tersebut diagregasi menjadi 11 sektor sebagaimana terlihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Pengelompokkan Negara dan Sektor Dalam Analisis GTAP

Pengelompokkan Negara	Pengelompokkan Sektor
Indonesia	1. Biji-bijian dan tanaman padi, gandum, sereal, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, minyak dari biji-bijian, gula tebu, gula bit, serat nabati, beras olahan.
D8- Indonesia (Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Mesir, Iran, Nigeria, Turki)	2. Daging ternak dan produk daging sapi, domba, kambing, kuda, produk hewan, susu mentah, Wol, sutera. 3. Hasil hutan, Ikan dan Perikanan.
OKI – D8	4. Makanan olahan, minyak nabati, lemak, produk susu, gula, produk makanan dan minuman dan produk tembakau. 5. Tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi.
Rest of the World	6. Light manufacturing products, kulit, produk kayu, produk kertas, penerbitan, produk logam, kendaraan bermotor dan suku cadang dan peralatan transportasi. 7. <i>Heavy manufacturing product</i> , bahan kimia, karet, produk plastik, logam besi, logam baja, peralatan elektronik, mesin dan perlengkapannya. 8. Utilitas dan konstruksi listrik, gas manufaktur, distribusi, air, Konstruksi. 9. Transportasi dan komunikasi, perdagangan; transportasi laut, transportasi udara. 10. Jasa-Jasa Lain, jasa keuangan, asuransi, jasa bisnis, rekreasi dan jasa lainnya; Pertahanan / Kesehatan / Pendidikan. 11. Minyak, gas, batubara, Mineral, produk batubara dan produk Mineral.

Sumber: Narayanan et al (2012), diolah

Hasil simulasi 2 skenario tersebut akan dibagi menjadi empat bagian yaitu 1) potensi dampak liberalisasi terhadap kondisi makroekonomi; 2) ekspor-impor dan neraca perdagangan; 3) output industri; dan 4) serapan tenaga kerja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden pelaku usaha. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari GTAP database dan data

1. D8 adalah kelompok kerjasama pembangunan 8 negara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Mesir, Turki dan Nigeria. Tujuan kerjasama ekonomi D-8 adalah untuk meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, diversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup.

dari berbagai terbitan instansi seperti data ekspor-impor dari Kementerian Perdagangan, serta beragam literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kerjasama Perdagangan antara Indonesia Dengan Anggota OKI

Arsitektur Sistem Perdagangan Antar Anggota OKI

Mengacu pada *The Third Extraordinary Islamic Summit* tahun 2005 yang diadakan di Makkah, OKI menargetkan *intratrade* antar anggotanya bisa mencapai 20% pada tahun 2015. Framework kerjasama perdagangan yang diandalkan oleh OKI untuk mencapai target tersebut adalah *Agreement on Trade Preferential System of the Organization of the Islamic Conferences (TPS-OIC)*. Ada tiga komponen utama dalam kerjasama TPS-OIC, yaitu *The Framework Agreement; The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS); The Rules of Origin*.

The Framework Agreement yang mulai diberlakukan tahun 2002 berisi tentang peraturan-peraturan umum dan prinsip-prinsip untuk negosiasi dalam pembentukan TPS. Di antara fitur utama dari perjanjian perdagangan adalah prinsip *Most Favored Nation (MFN)*, perlakuan yang sama bagi negara-negara anggota, perlakuan khusus bagi anggota yang masih berstatus *Least Developed Countries*. TPS OIC ini mencakup semua kelompok komoditas, termasuk produk pertanian. Perjanjian

ini juga menekankan pentingnya pengurangan hambatan perdagangan dalam bentuk hambatan dan non-tarif.

The Framework Agreement selanjutnya dijabarkan lebih rinci dalam *Preferential Tariff Scheme (PRETAS)* yang di dalamnya dinyatakan secara konkret kesepakatan pengurangan tarif beserta kerangka waktu (*time-table*) untuk implementasinya. PRETAS mulai diberlakukan pada Februari 2010. Sementara pemberlakuan *The Rule of Origin* dimulai pada Agustus 2012.

Komisi Tetap Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan OKI, COMCEC, telah merumuskan sebuah *road map* sebagai panduan untuk mencapai target 20% *intra-trade* antar anggota OKI. Ada lima aspek yang menjadi fokus *road map* tersebut yaitu pembiayaan perdagangan (*trade finance*), promosi perdagangan (*trade promotion*), fasilitas perdagangan (*trade facilitation*), pembangunan kapasitas (*capacity building*) dan pengembangan komoditas-komoditas strategis (*development of strategic commodities*).

Salah satu tantangan berat OKI dalam mencapai target 20% *intra trade* tersebut adalah belum semua negara anggota OKI meratifikasi TPS-OIC. Per September 2012, tercatat hanya 27 anggota OKI yang sudah meratifikasi *Framework Agreement*, 14 negara meratifikasi PRETAS dan baru 12 negara meratifikasi *Rule of Origin*. Indonesia termasuk negara yang belum meratifikasi TPS-OIC tersebut. Masih banyaknya anggota OKI yang belum bersedia meratifikasi TPS-OIC sangat jelas menunjukkan bahwa sebagian

besar anggota OKI belum berminat untuk mengintegrasikan perekonomiannya dengan anggota OKI lainnya.

Sejauh ini, negara-negara yang sudah meratifikasi *Framework Agreement* cukup memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan *intra trade* dalam OKI. Menurut catatan *The Standing Committee for Economic and Trade Cooperation (COMCEC) coordination office*, sejak *Makkah summit* tersebut, *intra trade* anggota OKI mengalami peningkatan hingga mencapai 17,7% pada tahun 2011.

Dinamika Perdagangan Indonesia dengan Anggota OKI

Anggota OKI merupakan bagian penting dalam perdagangan luar negeri Indonesia. Nilai perdagangan Indonesia-OKI menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam 10 tahun terakhir. Perdagangan luar negeri Indonesia-OKI dalam periode 2003-2012 mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perdagangan Indonesia secara total.

Pada periode tersebut, pertumbuhan perdagangan Indonesia-OKI mencapai 400%. Sementara pertumbuhan perdagangan Indonesia secara total pada periode yang sama sekitar 308%. Pada tahun 2012, nilai perdagangan Indonesia-OKI untuk komoditi migas dan non-migas telah mencapai USD 52,4 miliar atau setara dengan 13,7% total perdagangan Indonesia.

Menurut catatan *United Nations Commodity Trade Statistics Database*, pada tahun 2012 Indonesia melakukan ekspor ke 48 dari 57 negara anggota OKI. Dari jumlah tersebut, 10 besar negara OKI yang menjadi negara tujuan ekspor utama Indonesia meliputi Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Bangladesh, Mesir, Iran, Nigeria dan Djibouti. Sementara di sisi impor, tercatat Indonesia mengimpor dari 46 negara anggota OKI. Adapun 10 besar anggota OKI yang menjadi mitra impor Indonesia meliputi Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Azerbaijan, Iran, Brunei Darussalam dan Jordan.

Tabel 2. Neraca Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara OKI, 2010-2012

Tahun	2010	2011	2012
Neraca Perdagangan (USD Juta)	619,9	-3.900	-7.200

Sumber: United Nations Comtrade Data Base, 2013

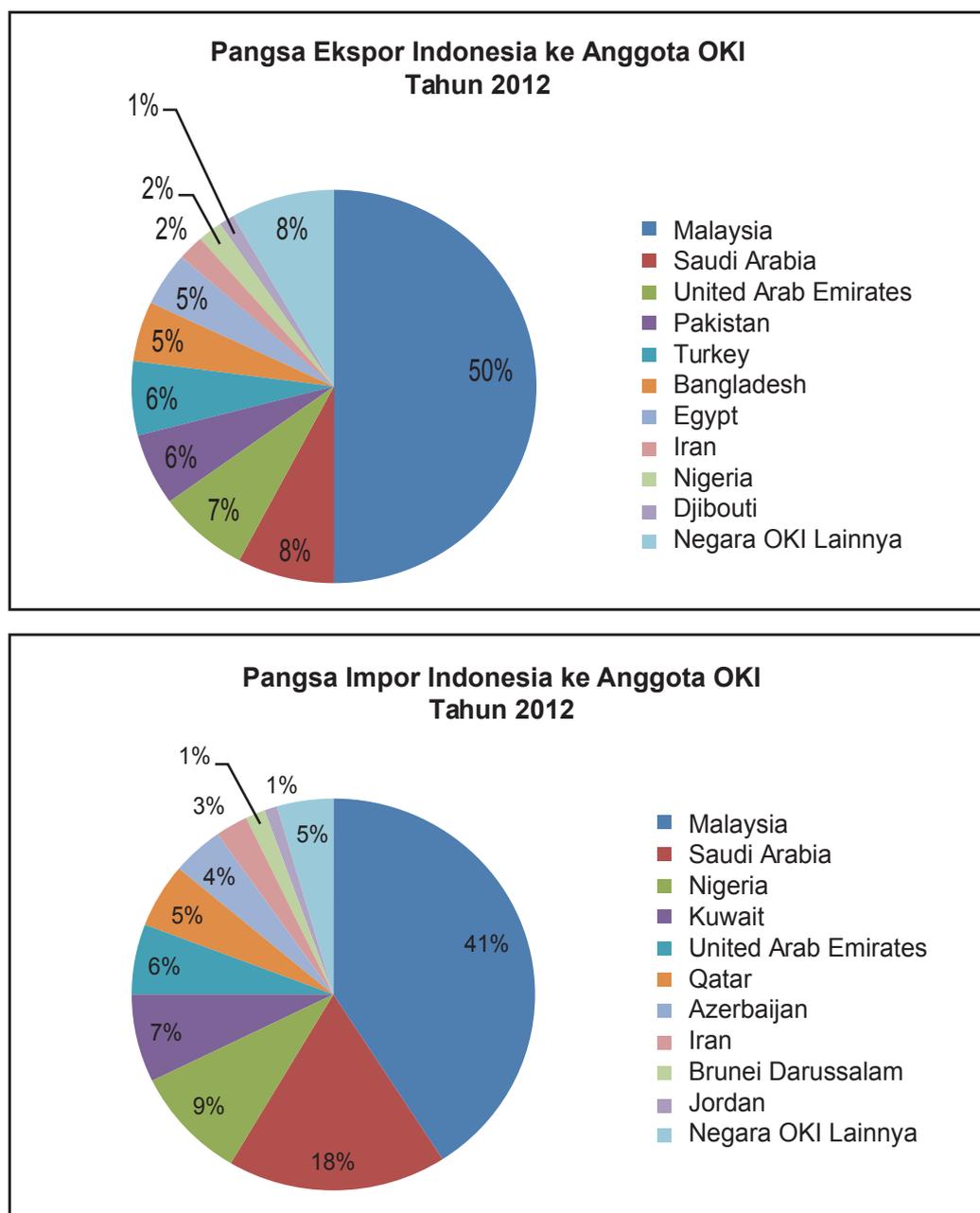
Perdagangan Indonesia-OKI dalam 10 tahun terakhir telah mengalami pergeseran baik secara struktur ekspor-impor maupun secara komoditas utamanya. Pada tahun 2010, Indonesia

mampu membukukan surplus perdagangan dengan OKI sebesar USD 619,9 juta (tabel 2).

Namun sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami defisit

perdagangan berkelanjutan dengan OKI. Pada tahun 2011, defisit perdagangan Indonesia dengan OKI tercatat sebesar USD 3,9 miliar (tabel 2). Nilai defisit perdagangan ini terus melonjak hingga mencapai USD 7,2 miliar pada tahun 2012. Salah satu pemicu

defisit perdagangan Indonesia dari anggota OKI adalah impor minyak yang cenderung terus meningkat. Sementara pada saat yang sama, Indonesia tidak mampu menggenjot pertumbuhan ekspor non migas untuk mengimbangi lonjakan tinggi impor minyak.



Gambar 1. Pangsa Ekspor dan Impor Indonesia Ke dan Dari Anggota OKI Tahun 2012

Sumber: United Nations Comtrade Data Base (2013), diolah

Dari sisi perdagangan non-migas, dinamika kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara OKI dalam dua tahun terakhir ini berjalan relatif konstan. Secara statistik tidak ada perubahan signifikan dalam perdagangan antara kedua pihak. Pada tahun 2012, nilai perdagangan non-migas Indonesia dengan 11 anggota OKI yang menjadi mitra utama tercatat sebesar USD 28,1 miliar atau sekitar 9,3% dari total perdagangan non-migas Indonesia. Nilai perdagangan non-migas Indonesia-OKI pada tahun 2012 hanya tumbuh tipis 0,1% dari perdagangan tahun 2011.

Pertumbuhan perdagangan non-migas Indonesia-OKI pada tahun 2012 menjadi yang terendah paska terjadinya puncak krisis keuangan global pada tahun 2009. Pada tahun 2009, perdagangan non-migas Indonesia-OKI mengalami pertumbuhan negatif sebesar -17,1%. Kontraksi perdagangan non-migas Indonesia-OKI yang terjadi pada tahun 2009 ini jauh lebih besar dari perlambatan perdagangan Indonesia dengan seluruh mitra dagang yang tercatat sebesar -15,1%. Kondisi ini tidak berlangsung lama, pada tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan perdagangan mencapai 34,8% dan 27%. Lonjakan perdagangan yang cukup fantastis dengan OKI ini meredup tahun 2012 yang ditandai dengan anjloknya pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia ke anggota OKI sebesar -5,5%.

Ada beberapa faktor yang diduga kuat menjadi penyebab dari melambatnya pertumbuhan perdagangan Indonesia - OKI diantaranya: *Pertama*, perlambatan pertumbuhan ekonomi di sebagian negara OKI yang menjadi mitra dagang utama Indonesia. Laporan IMF (2013b) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2012 di kelompok *Group Cooperation Council (GCC)*² tercatat sebesar 6%. Padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata kelompok ini sejak tahun 2000 sampai 2011 (kecuali tahun 2009) selalu berada di atas angka 6%. Perlambatan ekonomi kelompok GCC yang merupakan pengeskor minyak terbesar ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya harga minyak dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam kelompok ini telah menurunkan permintaan produk impor asal Indonesia

Kedua terkait dengan fenomena *Arab Spring*³ yang melanda beberapa negara OKI di kawasan Timur Tengah dan Afrika seperti Tunisia, Libya, Mesir, Yaman, Bahrain, Suriah, Iraq, Yordania, Kuwait, Maroko dan Sudan. Masalah ekonomi dan politik dalam negeri di beberapa negara OKI ini telah berdampak pada menurunnya daya beli masyarakatnya sehingga mengurangi permintaan produk-produk impor termasuk dari Indonesia.

Faktor lainnya terkait dengan penurunan harga komoditas ekspor secara umum. Menurut catatan Kementerian Perdagangan, secara

2. GCC beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan the United Arab Emirates.

3. Arab Spring adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan revolusi, demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah, kerusuhan, pemberontakan, perang saudara di kawasan Arab yang terjadi sejak tahun 2010.

umum beberapa komoditas ekspor Indonesia yang mengalami penurunan harga di pasar global pada tahun 2012 diantaranya adalah bahan bakar mineral (harga turun 3,8%), lemak dan minyak hewan/nabati (harga turun 1,7%), barang dari karet (harga turun 27%), bijih kerak dan abu logam (harga turun 30,8%), bahan kimia organik (harga turun 26,2%).

Perlambatan pertumbuhan perdagangan Indonesia – OKI diharapkan tidak akan berlangsung lama. Indonesia sendiri mempunyai potensi untuk memperbaiki kinerja perdagangannya baik di pasar negara-negara OKI maupun pasar global secara umum. Menurut penilaian World Economic Forum (WEF) (2013), dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mampu memperbaiki posisi daya saingnya secara umum. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh membaiknya peringkat *Global Competitiveness Index (GCI)* Indonesia. Pada tahun 2013 posisi GCI Indonesia berada di urutan 38, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya berada di posisi 50.

Pendalaman perdagangan dengan OKI juga diharapkan bisa terjadi dengan dorongan D8 yang diharapkan akan menjadi *main drivers* dalam liberalisasi perdagangan OKI. Kelompok D8 terdiri dari 8 negara OKI yaitu Malaysia, Iran, Turkey, Indonesia, Egypt, Bangladesh, Pakistan, and Nigeria. Sebagaimana dikemukakan oleh Jafari *et al* (2011) bahwa dalam beberapa tahun ini hubungan ekonomi antar negara D8 telah menunjukkan perluasan dan penguatan. Kelompok D8 tidak hanya aktif mendorong proses liberalisasi dalam OKI, namun juga aktif berpartisipasi dalam proses liberalisasi global.

Dinamika Kerjasama Investasi antara Indonesia dengan Anggota OKI

Payung hukum perjanjian kerjasama investasi antar anggota OKI dituangkan dalam *The Agreement for Promotion, Protection and Guarantee of Investments among the OIC Member States*. Perjanjian ini berlaku efektif sejak Februari 1988 dan hingga saat ini sudah ditandatangani oleh 31 negara dan baru diratifikasi oleh 25 anggota OKI. Indonesia termasuk salah satu anggota yang sudah meratifikasi perjanjian ini.

Perjanjian investasi OKI ini meliputi prinsip-prinsip dasar investasi, pemberian fasilitas dan insentif, perlakuan kesetaraan serta perlindungan investasi anggota OKI dari berbagai resiko komersial. Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan investasi ini harus mengizinkan transfer modal diantara mereka dan menggunakannya dalam bidang-bidang yang diizinkan untuk investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian ini secara khusus juga menyatakan perlunya jaminan dari negara tujuan investasi untuk memberikan kebebasan dalam melepaskan kepemilikan modal/saham melalui penjualan sebagian atau seluruhnya, likuidasi, cessi, hibah atau cara lainnya.

Dalam konteks perekonomian Indonesia, perjanjian kerjasama investasi OKI ini belum menjadi daya tarik dan daya dorong bagi perkembangan investasi anggota OKI di Indonesia. Investasi anggota OKI di Indonesia terbilang masih relatif kecil dibandingkan dengan investasi dari kelompok negara

lain. Pada tahun 2010, jumlah investasi dari anggota OKI tercatat sekitar USD 603 juta (tabel 3) atau hanya 3,7% dari total PMA yang mengalir ke Indonesia. Investasi dari negara-negara OKI sempat meningkat pada tahun 2011, namun satu tahun kemudian kembali mengalami perlambatan hingga

porsinya hanya sekitar 2,4% dari total PMA yang masuk ke Indonesia pada tahun 2012. Pada periode 2010-2012, secara agregat berdasarkan negara asalnya, ada 5 investor OKI terbesar di Indonesia yaitu Malaysia, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki dan Mauritania.

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Investasi PMA Dari Negara-Negara OKI, 2010-2012 (Juta USD)

Negara	2010		2011		2012	
	P	I	P	I	P	I
Afghanistan	-	-	-	-	1	0.6
Arab Saudi	2	-	5	0.1	2	-
Brunei Darussalam	2	0.0	5	11.8	3	0.0
Iraq	-	-	1	-	1	0.4
Iran	1	0.0	3	0.5	3	1.5
Lebanon	-	-	4	0.1	1	0.0
Malaysia	198	472.1	275	618.3	237	529.6
Mali	2	0.6	4	0.2	-	-
Maroko	1	-	3	0.0	2	0.0
Mauritania	4	117.4	2	48.0	1	-
Mesir	-	-	2	0.1	3	0.7
Oman	1	0.1	1	0.1		
Pakistan	5	1.0	2	0.4	4	0.2
Qatar	1	-	2	0.0	1	-
Sudan	1	0.2	1	0.0	-	-
Turki	3	5.2	6	10.9	13	7.3
Ukraina	-	-	-	-	1	0.0
Uni Emirat Arab (UEA)	6	6.2	6	6.8	12	32.4
Yaman	-	-			1	0.1
Yordania	-	-	1	1.1	1	19.9
Jumlah Investasi Negara-Negara OKI	227	603	323	698	287	592
Jumlah Investasi Total di Indonesia	3,076	16,215	4,342	19,475	4,579	24,565
Porsi Investasi OKI Terhadap Total Investasi (%)	7.4	3.7	7.4	3.6	6.3	2.4

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2013)

Keterangan :

- P: Jumlah Proyek, I: Nilai Investasi Dalam Juta USD
- Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi Yang Perizinannya Dikeluarkan Oleh Instansi Teknis/Sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) Dan Investasi Rumah Tangga / *Excluding Of Oil & Gas, Banking, Non Bank Financial Institution, Insurance, Leasing, Investment Which Licenses Issued By Technical/Sectoral Agency, Porto Folio As Well As Household Investment.*

Berdasarkan sektor, investasi Malaysia di Indonesia terkonsentrasi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perbankan dan telekomunikasi. Sementara investasi UEA di Indonesia diantaranya berupa proyek USD 1,5 miliar *oil rig* di lepas pantai Pulau Batam, proyek real estate USD 1,7 miliar di Epicentrum Jakarta, serta proyek logistik infrastruktur dengan RAK minerals di Sumatera. Investasi di sektor pariwisata adalah berupa pembangunan hotel dan area wisata di Lombok senilai USD 2 miliar (UEA Embassy in Indonesia, 2013).

Rendahnya minat investor dari OKI untuk menanamkan modalnya di Indonesia setidaknya mengindikasikan beberapa hal berikut ini. *Pertama*, para investor OKI memandang Indonesia kurang prospektif untuk bisnis mereka. Pandangan ini terjadi karena banyak faktor, salah satunya adalah minimnya informasi tentang Indonesia. *Kedua*, Indonesia belum mampu mewarnai kerjasama ekonomi dalam bingkai OKI. *Ketiga*, secara umum iklim investasi di Indonesia masih dianggap belum *business friendly*. Hal ini bisa dilihat dari survei World Bank (2013) tentang *doing business* 2013 yang menempatkan Indonesia pada posisi 128 dari 184 negara. Hal ini jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara Islam lainnya seperti, Malaysia (posisi 12), Turki (posisi 71) dan Pakistan (posisi 107).

Di sisi lain, investor Indonesia juga belum banyak yang memanfaatkan peluang investasi di negara-negara OKI. Selama ini hanya tercatat beberapa pengusaha dan BUMN saja yang

berinvestasi di negara-negara OKI. Menurut catatan kedutaan besar UEA, beberapa investasi dari Indonesia di UEA berupa proyek konstruksi di Abu Dhabi oleh PT. Abu Dhabi Berkah Abdi Mulya, dan pembangunan gedung perkantoran senilai USD 900 juta oleh PT. Waskita Karya dan BUMN RI di Abu Dhabi.

PMA yang berasal dari anggota OKI telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Kontribusi PMA dari OKI secara langsung bisa dilihat melalui serapan tenaga kerja, pendalaman struktur dan kerjasama antar industri serta nilai tambah dalam GDP. Mengingat data kuantitatif tentang kontribusi PMA ini tidak tersedia secara memadai, maka untuk menghitungnya digunakan beberapa proksi untuk mengukurnya. Dalam hal ketenagakerjaan, PMA dari negara OKI pada periode 2010-2012 yang berjumlah USD 1,89 miliar (setara dengan Rp.18,93 triliun pada kurs USD 1 = Rp 10,000) diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 33.152 orang. Perkiraan angka ini mengacu pada hasil studi Soekarni et al (2010) yang menyebutkan bahwa rata-rata rasio nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di PMA sekitar Rp 571 (artinya setiap Rp 571 juta investasi PMA menyerap tenaga kerja 1 orang).

Potensi Pengaruh Liberalisasi OKI Terhadap Perekonomian Indonesia

Liberalisasi perdagangan OKI berpotensi mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui berbagai mekanisme transmisi. Pengaruh dari liberalisasi perdagangan OKI terhadap perekonomian Indonesia

secara garis besar bisa terjadi melalui mekanisme transmisi berikut ini: (i) dalam tahap pertama, efek perjanjian liberalisasi perdagangan OKI terhadap Indonesia akan terjadi melalui serangkaian perubahan regulasi dalam bidang perdagangan (kegiatan ekspor-impor) yang kemudian diikuti dengan perubahan regulasi kegiatan investasi; (ii) dalam tahap kedua, efek implementasi liberalisasi perdagangan OKI akan mulai masuk ke dalam aktivitas perdagangan, investasi,

industri, penyerapan tenaga kerja serta kondisi makroekonomi lainnya; (iii) dalam tahap ketiga, perubahan-perubahan dalam regulasi dan aktivitas perdagangan, investasi, industri, tenaga kerja serta kondisi makro ekonomi akan berpengaruh pada regulasi dan aktivitas perekonomian lainnya yang mempunyai keterkaitan erat dengan kegiatan perdagangan, investasi, industri dan migrasi tenaga kerja seperti aktivitas di sektor keuangan, sektor pendidikan dan sektor lainnya.

Tabel 4. Potensi Dampak Liberalisasi Perdagangan OKI terhadap Kondisi Makroekonomi Indonesia dan OKI

Indikator Makroekonomi	Skenario 1 Partial Liberalization			Skenario 2 Full Liberalization		
	Indonesia	D8	OKI minus D8	Indonesia	D8	OKI minus D8
Kesejahteraan (Miliar USD)	-77,0	-301,80	-251,89	11,00	93,23	53,64
Perubahan Pertumbuhan ekonomi (% perubahan dalam GDP Quantity Index)	-0,17	-0,18	-0,17	0,03	0,06	0,04
Inflasi (% perubahan dalam GDP Price Index)	-0,22	-0,24	-0,26	-0,29	-0,29	-0,4
Perubahan Neraca Perdagangan (Ekspor – Impor) (Miliar USD)	-42,13	-195,32	-269,85	-36,14	-227,68	-298,04
Terms of trade (% change)	-12,35	-11,75	-3,25	-0,19	-0,18	-0,08

Sumber: Analisis GTAP (2013)

Hasil simulasi menunjukkan bahwa Indonesia dan anggota OKI lainnya berpotensi memperoleh manfaat lebih besar dan mengalami resiko lebih kecil ketika diterapkan *full liberalization scenario* (tabel 4). Pada skenario ini, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mendapatkan tambahan manfaat peningkatan sebesar 0,03% (tabel 4).

Bagi negara dalam kelompok D8 dan anggota OKI lainnya, *full liberalization scenario* diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 0,06% dan 0,04%. Hasil ini memperkuat studi yang dilakukan Ghani (2011)⁴ yang menjelaskan bahwa liberalisasi perdagangan yang dilakukan oleh anggota OKI telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan GDP dan GDP per kapita di negara-negara tersebut dalam jangka menengah. Abidin, Irwan Shah Zainal et. al (2014), misalnya, dengan menggunakan gravity model, menjelaskan bahwa kerjasama bilateral Malaysia dan OKI serta liberalisasi perdagangan OKI berpotensi meningkatkan pendapatan perkapita Malaysia dan anggota OKI. Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi ini merupakan akumulasi bersih dari perubahan yang terjadi pada neraca perdagangan, perubahan output industri, konsumsi domestik, tambahan serapan tenaga kerja dan lain-lain.

Di sisi lain, dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi anggota OKI berpotensi terjadi jika liberalisasi yang

diterapkan dalam OKI hanya sebatas *partial liberalization* (skenario 1, tabel 4). Skenario ini diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan ekonomi Indonesia (-0,17%), negara-negara dalam kelompok D8 (-0,18%) dan anggota OKI lainnya (-0,17%). Beberapa faktor yang diduga akan berpengaruh adalah *term of trade* yang menurun secara tajam sehingga memperburuk kondisi defisit neraca perdagangan. Hal ini selanjutnya berpengaruh pada penurunan output industri dan pada akhirnya mengurangi kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam kondisi seperti ini, sumber pertumbuhan ekonomi lain seperti konsumsi domestik juga berpotensi melambat.

Liberalisasi perdagangan dalam OKI, baik pada *skenario partial liberalization* maupun *full liberalization*, juga diprediksi akan berkontribusi pada penurunan laju inflasi. Indonesia dan negara-negara dalam kelompok D8 diperkirakan akan mampu meredam inflasi sekitar -0,29% pada *full liberalization scenario*. Sementara bagi anggota OKI lainnya, liberalisasi OKI akan mampu membantu penurunan inflasi hingga -0,4%. Logika ekonomi yang bisa menjelaskan hal ini adalah bahwa liberalisasi akan mengeliminir faktor-faktor penyebab *imported inflation* yang disebabkan oleh ketidakpastian dan ketidakberlanjutan pasokan bahan baku/produk setengah jadi/ produk jadi serta fluktuasi harga yang berlebihan.

4 Dalam studi Ghani ini, negara OKI yang dianalisis berjumlah 24 negara yaitu yang sudah melakukan liberalisasi perdagangan sejak periode 1979-2001.

Tabel 5. Potensi Dampak Liberalisasi Perdagangan OKI terhadap Pertumbuhan Ekspor dan Impor Indonesia

Indikator	Skenario 1 Partial Liberalization		Skenario 2 Full Liberalization	
	Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)	Pertumbuhan Ekspor (%)	Pertumbuhan Impor (%)
GrainsCrops	29,69	29,82	30,33	30,39
MeatLstk	21,44	22,07	16,75	17,16
ForestFish	8,92	9,17	8,53	8,72
ProcFood	12,18	12,6	15,15	15,62
TextWapp	28,72	29,36	23,77	24,13
LightMnfc	9,8	10,16	10,96	11,28
HeavyMnfc	13,15	13,56	12,78	13,06
Util_Cons	44,24	44,24	32,00	32,00
TransComm	16,19	10,88	15,10	11,69
OthServices	11,63	11,63	12,92	12,92
OilGasMin	24,1	24,37	18,49	18,50

Sumber: Perhitungan GTAP (2013)

Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia, kelompok D8 dan anggota OKI berpotensi mengalami penambahan defisit ketika diberlakukan liberalisasi perdagangan baik secara parsial maupun penuh. Indonesia dan kelompok negara D8 diperkirakan menjadi pihak yang akan mengalami dampak defisit neraca perdagangan terbesar dibandingkan dengan anggota OKI lainnya. Jika melihat akumulasi penambahan defisit neraca perdagangan yang akan dialami oleh 7 negara D8 sebesar USD, 227,68 miliar maka diperkirakan dampak liberalisasi

OKI terhadap neraca perdagangan D8 merata pada kisaran USD 30-an miliar. Untuk Indonesia misalnya, pada *partial liberalization scenario* diperkirakan berpotensi mengalami tambahan deficit neraca perdagangan hingga mencapai USD 42,13 miliar. Potensi defisit ini bisa diperkecil menjadi sekitar USD 36,14 miliar pada *full liberalization scenario*. Defisit ini terjadi karena akselerasi pertumbuhan impor lebih cepat daripada pertumbuhan ekspor di semua komoditas sebagaimana terlihat dalam tabel 6.

Tabel 6. Potensi Dampak Liberalisasi Perdagangan OKI Terhadap Perubahan Neraca Perdagangan Sektoral Indonesia

Indikator	Skenario 1 Partial Liberalization (USD Miliar)	Skenario 2 Full Liberalization (USD Miliar)
GrainsCrops	-4,53	-5,16
MeatLstk	-1,38	-1,22
ForestFish	-0,06	-0,03
ProcFood	0,56	1,87
TextWapp	10,79	13,54
LightMnfc	-0,67	1,47
HeavyMnfc	5,15	-8,44
Util_Cons	-1,77	-1,09
TransComm	-8,94	-8,41
OthServices	-13,53	-12,31
OilGasMin	-27,76	-16,37

Sumber: Perhitungan GTAP (2013)

Potensi dampak liberalisasi OKI baik pada *partial liberalization* maupun *full liberalization scenario* terhadap neraca perdagangan sektoral (tabel 6) memiliki pola yang hampir sama walaupun dengan besaran yang sedikit berbeda. Pada skenario pertama, Indonesia diperkirakan akan mengalami defisit perdagangan pada 8 komoditas (*GrainsCrops, MeatLstk, Forest Fish, LightMnfc, Util_Cons, TransComm, OthServices dan OilGasMin*) dan surplus pada 3 komoditas (*ProcFood, TextWapp dan HeavyMnfc*). Akumulasi

perubahan defisit perdagangan pada skenario pertama diperkirakan mencapai USD 42,13 miliar. Sebanyak 7 komoditas yang diperkirakan defisit pada skenario pertama akan tetap berjalan defisit pada skenario kedua, namun dengan besaran yang lebih kecil. Satu tambahan komoditi yang diprediksi akan mengalami defisit pada skenario kedua adalah *HeavyManfc*. Menariknya, defisit produk *HeavyMnfc* pada skenario kedua akan terimbangi dengan surplusnya produk *LightMnfc*. Produk *procFood* dan *TextWapp* diperkirakan akan konsisten

menyumbang surplus perdagangan pada kedua skenario diatas.

Satu hal penting yang perlu menjadi catatan adalah tambahan defisit perdagangan terbesar pada kedua skenario berasal dari 4 komoditas yaitu *GrainCrops*, *TransComm*, *OthServices* dan *OilGasMin*. Pada *full liberalization scenario*, tambahan defisit juga terjadi pada *HeavyMnfc*. Defisit perdagangan pada lima komoditas ini setara dengan 95,6% dari akumulasi komoditas yang mengalami defisit pada *full liberalization scenario*. Dua komodoitas primer, *GrainCrops* dan *OilGasMin*, diperkirakan menyumbang defisit perdagangan masing-masing 9,7% dan 30,9% dari akumulasi komoditas yang mengalami defisit.

Bagi Indonesia, mengalami defisit perdagangan pada komoditas primer seperti *GrainCrops* dan *OilGasMin* tentu sangat memprihatinkan. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia seharusnya mampu mengerem laju impor produk-produk dalam kelompok komoditas *GrainCrops*, kecuali gandum yang memang kurang cocok untuk ditanam di tanah Indonesia. Bahkan sebaliknya, jika potensi sumberdaya alam ini mampu dikelola dan diolah secara optimal, Indonesia berpotensi mendapatkan surplus dalam perdagangan internasional untuk komoditas *GrainCrops*.

Liberalisasi menyediakan banyak peluang serta tantangan bagi produk pertanian Indonesia. Menurut Apriantono (2007), kualitas produk pertanian di Indonesia telah menjadi titik kritis ditingkatkan untuk kompetisi di pasar

domestik dan global. Saat ini, salah satu tantangan berat yang dihadapi produsen produk pertanian untuk bersaing di pasar ekspor produsen dan eksportir produk pertanian harus memenuhi persyaratan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) dan *Technical Barrier to Trade* (TBT). Untuk mencapai persyaratan ini, maka produser di Indonesia harus membuktikan bahwa mereka telah melakukan *Good Agricultural Practices* (GAP). Pada produk pertanian olahan, juga dipersyaratkan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP). Persyaratan ini telah menjadi hambatan besar bagi sebagian besar produsen pertanian di Indonesia.

Defisit perdagangan yang cukup besar juga terjadi pada impor *Oil Gas Mining* yang mendorong defisit neraca perdagangan secara keseluruhan semakin melebar. Dari sisi *demand*, permintaan energi minyak yang meningkat ini bisa dipandang sebagai hal yang wajar seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Namun menjadi tidak wajar ketika hal ini tidak dibarengi dengan ketersediaan *supply* dalam negeri akibat ketersediaan sumberdaya yang menipis. kondisi ini diperparah dengan minimnya upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi minyak. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan Indonesia belum bisa meraih manfaat besar dalam integrasi ekonomi dengan OKI. Pertama, secara geografis, posisi Indonesia relatif jauh dari komunitas anggota OKI. Sebagaimana terlihat dalam peta di bawah ini, posisi geografis

anggota OKI lebih terkonsentrasi di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan dan Afrika. Kondisi ini menyebabkan biaya transportasi yang harus ditanggung oleh eksportir dan importir negara OKI lainnya menjadi lebih tinggi ketika akan mengekspor dan atau mengimpor barang dari Indonesia dibandingkan dengan mengimpor barang serupa dari negara OKI lainnya yang lebih dekat. Lokasi geografis yang jauh juga berpotensi meningkatkan resiko dalam proses ekspor dan impor barang-barang yang tidak tahan lama, seperti pada komoditas pertanian. Hal ini pada akhirnya dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas barang. Maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memperbaiki keunggulan daya saingnya untuk mencapai *better price, better quality* dan *better delivery time*.

Kedua, struktur perdagangan Indonesia-OKI sangat kental diwarnai oleh perdagangan komoditi minyak. Pada tahun 2011, berdasarkan data dari Kementerian ESDM, Impor minyak bumi Indonesia yang berasal dari anggota OKI mencapai 89,5% dari total impor minyak bumi. Pada tahun tersebut, Indonesia tercatat mengimpor minyak bumi dari Saudi Arabia, Azerbaijan, Nigeria, Brunei Darussalam dan Malaysia. Di sisi lain, pertumbuhan perdagangan non-migas berjalan relatif lambat.

Ketiga, peluang Indonesia memanfaatkan pasar negara-negara OKI belum optimal karena kuatnya intra-trade antar negara OKI di kawasan tertentu seperti di Asia Selatan, Asia

Timur dan Pasifik dan kelompok GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia dan U.A. Emirates). Sebagai contoh, menurut Alpay, Savas, Murat Atlamaz dan Esat Bakimli (2011), sebanyak dua pertiga import negara-negara OKI di kawasan Asia Timur dan Pasific ini berasal dari kawasan mereka sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sekitar seperempat dari total intra impor dalam OKI ditujukan ke kelompok GCC, sementara 22,8% lainnya ke negara-negara di Timur Tengah. Dengan demikian, hampir setengah dari intra impor dalam OKI terjadi dalam kelompok negara OKI yang berada di Timur Tengah.

Perubahan peta perdagangan dalam skema liberalisasi OKI dipastikan akan berpengaruh terhadap output sektor industri Indonesia (tabel 7). Dalam *partial liberalization scenario*, output sektor industri yang memproduksi tujuh produk (*Graincrops, Meatlstk, Forsetfish, Frocfood, Transcom, Othservices, Oilgasmin*) diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan. Industri *Othservice* dan *Meatlstk* berpotensi menjadi sektor yang paling terpengaruh dengan penurunan tertinggi masing-masing -32,76% dan -19,45%. Di sisi lain, liberalisasi perdagangan dalam skema liberalisasi OKI juga berpotensi mendorong laju pertumbuhan output industri yang memproduksi 4 produk seperti *Textwapp, Lightmnfc, Heavymnfc* dan *Util_cons*. Pertumbuhan produk *Textwapp* diprediksi menjadi yang paling signifikan (139%).

Tabel 7. Potensi Dampak Liberalisasi Perdagangan OKI Terhadap Perubahan Pertumbuhan Output Sektor Industri Indonesia

Sub-Sektor Industri	Skenario 1 Partial Liberalization (%)	Skenario 2 Full Liberalization (%)
GrainsCrops	-7,94	-7,62
MeatLstk	-19,45	-10,05
ForestFish	-1,76	4,70
ProcFood	-4,43	4,95
TextWapp	139,02	101,53
LightMnfc	25,03	18,75
HeavyMnfc	68,22	13,95
Util_Con	20,96	28,04
TransComm	-6,61	-1,29
OthServices	-32,76	-16,88
OilGasMin	-1,59	-9,29

Sumber: Perhitungan GTAP (2013)

Sedikit berbeda dengan skenario pertama, liberalisasi OKI pada *full liberalization scenario* berpotensi mendorong pertumbuhan *output* sektor industri secara lebih luas. Ada 6 sektor industri yang bisa menikmati pertumbuhan *output* positif pada skenario ini yaitu *Forestfish*, *procfood*, *Textwapp*, *Lightmnfc*, *Heavymnfc* dan *Util-cons*. Sementara 5 industri lainnya dikhawatirkan akan mengalami penurunan *output* yaitu *Graincrops*, *Meatlstk*, *Transcom*, *Othservices*, *Oilgasmin*.

Pada kasus produk *Meatlstk*, Indonesia memang masih tergantung pada pasokan impor. Ketergantungan pada pasokan impor produk *Meatlstk*

bukan hanya untuk sisi konsumsi, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku sektor industri makanan. Menurut salah satu narasumber penelitian ini, seorang pengusaha makanan, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan produk *Meatlstk* impor salah satunya disebabkan oleh masih lemahnya pengembangan di sisi hulu, khususnya peternakan. Dalam persepsi narasumber, peternakan sapi perah dan sapi potong saat ini kondisinya sama saja dengan tahun 70-an. Sekarang sangat minim jumlah peternakan besar yang bisa memasok susu dan daging untuk kebutuhan industri makanan dalam negeri.

Tabel 8. Potensi Dampak Liberalisasi Perdagangan OKI Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Sub-Sektor Industri	Skenario 1 Partial Liberalization		Skenario 2 Full Liberalization	
	Perubahan Permintaan TK Terampil (%)	Perubahan Permintaan TK Kurang Terampil (%)	Perubahan Permintaan TK Terampil (%)	Perubahan Permintaan TK Kurang Terampil (%)
GrainsCrops	-12,28	-14,1	-13,03	-14,44
MeatLstk	-24,93	-27,84	-16,64	-19,3
ForestFish	-1,39	-2,91	6,73	5,69
ProcFood	0,8	-7,56	7,83	2,01
TextWapp	152,93	129,48	104,5	97,96
LightMnfc	31,81	19,59	21,42	14,87
HeavyMnfc	77,13	60,7	16,57	10,03
Util_Cons	29,01	16,1	31,63	24,54
TransComm	1,49	-10,48	3,46	-4,97
OthServices	-30,07	-36,56	-15,3	-21,84
OilGasMin	-0,62	-4,04	-11,46	-13,81

Sumber: Perhitungan GTAP (2013)

Penurunan maupun pertumbuhan output sektor industri akan mempunyai efek domino terhadap kemampuannya dalam menyerap dan mempertahankan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Pada skenario 1-skenario *partial liberalization*, penurunan output tujuh sub-sektor industri (*GrainsCrops*, *MeatLstk*, *ForestFish*, *ProcFood*, *TransComm*, *OthServices* dan *OilGasMin*) akan menyebabkan berkurangnya permintaan tenaga kerja kurang terampil di tujuh sub-sektor industri tersebut (tabel 8). Hal yang sama juga akan dirasakan oleh para

pencari kerja di kelompok tenaga kerja terampil, walaupun dengan penurunan yang lebih rendah.

Pada kasus *Procfood* dan *Transcomm industry*, walaupun jumlah *output* diperkirakan menurun, namun penyerapan tenaga kerja terampil berpotensi tetap tumbuh positif (tabel 8). Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah penggunaan teknologi baru yang membutuhkan tenaga kerja terampil untuk mengoperasikannya, terjadi proses substitusi tenaga kerja kurang terampil oleh tenaga kerja terampil dan

ekspektasi perubahan permintaan yang cepat untuk kedua produk tersebut.

Sama halnya dengan skenario pertama, tenaga kerja kurang terampil akan menjadi pihak yang paling terdampak negatif oleh proses *full liberalization scenario*. Penurunan output pada lima sub-sektor industri berimplikasi pada turunnya secara signifikan permintaan tenaga kerja kurang terampil di sub-sektor tersebut (tabel 8). Hal yang sama juga terjadi pada penyerapan tenaga kerja terampil di sektor tersebut (kecuali *Transcomm*), namun dengan besaran pengaruh yang lebih kecil.

Di sisi lain, sub-sektor sektor industri yang memiliki pertumbuhan output positif akan menjadi mesin penyerap tenaga kerja yang besar baik untuk tenaga kerja terampil maupun kurang terampil. Diantara sub-sektor industri tersebut, produsen *Textwapp* akan menjadi sub-sektor dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tertinggi, baik pada skenario pertama maupun skenario kedua.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kurang intensifnya kerjasama ekonomi antar anggota OKI dimanfaatkan oleh negara non-anggota untuk penetrasi produk di pasar OKI. Temporal (2011) menyebutkan bahwa saat ini banyak produk dengan brand Barat (*Western brands*) telah menguasai pasar negara-negara OKI. Sementara penjualan produk dengan *brand* Muslim masih relatif tertinggal. Sementara itu, Hossain (2005) menjelaskan bahwa lebih dari separuh total impor 30 anggota OKI berasal dari negara maju di luar anggota OKI, dimana tiga diantaranya sebagai

mitra dagang utamanya adalah Amerika, Jepang dan Eropa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gurler (2000), struktur produksi dan ekspor mayoritas negara OKI masih bergantung pada sektor primer. Di satu sisi, hal ini mengindikasikan bahwa memang kerjasama perdagangan dan kemampuan inovasi para pengusaha dari anggota OKI untuk memproduksi barang dengan *brand* Muslim masih rendah. Namun di sisi lain, masih minimnya produk dengan *brand* Muslim merupakan kesempatan bagi investor dari anggota OKI untuk mulai memasuki pasar anggota OKI. Beberapa produk potensial yang bisa dikembangkan dengan brand Muslim untuk pasar di negara-negara OKI meliputi *food and beverage; education; tourism and hospitality; medical and pharmaceutical products and services; entertainment; cosmetics and personal care; internet and digital products and services; financial products and services; children's products; dan lifestyle and fashion products*.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

OKI berpotensi menjadi pasar potensial bagi produk ekspor Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Potensi pasar anggota OKI yang besar ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia jika mempunyai akses pasar yang luas. Secara bilateral, Indonesia sudah mempunyai kerjasama perdagangan dengan beberapa negara OKI, namun tentu hal ini belum cukup untuk

mendapatkan akses pasar ke semua anggota OKI. Skema liberalisasi perdagangan yang dibuat oleh OKI melalui TPS-OIC merupakan saluran awal untuk membuka akses menuju integrasi ekonomi yang lebih dalam.

Hasil simulasi dengan model GTAP menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan negara-negara OKI memberikan dampak sektoral yang variatif. Indonesia berpotensi mendapatkan manfaat besar jika liberalisasi perdagangan dalam OKI dilakukan secara komprehensif/*full liberalization* (meliputi semua komoditas dan pengurangan tariff secara penuh). Melalui skema ini, Indonesia berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03% dan menurunkan inflasi 0,29%. Namun demikian, satu hal yang perlu diperhatikan adalah liberalisasi perdagangan OKI, dalam jangka pendek, juga berpotensi meningkatkan defisit neraca perdagangan Indonesia.

Dalam beberapa tahun ke depan ketika sebagian besar anggota OKI sudah meratifikasi TPS-OIC, maka Indonesia perlu mengambil peran untuk mendorong percepatan dan pendalaman liberalisasi perdagangan yang lebih komprehensif antar anggota OKI. Oleh karena itu, sebagai langkah awal, Indonesia perlu kiranya segera meratifikasi perjanjian TPS-OIC. Seandainya pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi dan bergabung dalam skema TPS-OIC, maka pembenahan dalam aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan perlu dibenahi sedini mungkin khususnya terkait aspek pembiayaan perdagangan,

promosi perdagangan, fasilitas perdagangan, pembangunan kapasitas dan pengembangan komoditas-komoditas strategis. Hal ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia baik di pasar OKI maupun pasar global. Dengan produk yang berdaya saing, maka diharapkan Indonesia bisa memperkecil defisit neraca perdagangan dan bahkan merubahnya menjadi surplus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para reviewer, editor dan mitra bestari atas kritik dan saran-saran yang sangat konstruktif. Selain itu, apresiasi yang tinggi sudah selayaknya diberikan kepada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI atas dukungannya selama penelitian naskah ini. Pendapat dalam paper ini merupakan tanggung jawab pribadi penulis dan tidak mewakili LIPI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Irwan Shah Zainal, et. al. (2014). Trade Linkages between Malaysia and the OIC Member Countries: Empirical Evidence Based on Gravity Model. *American Journal of Applied Sciences* 2014, 11 (11): 1938-1944
- Alpay, Savas., Murat Atlamaz dan Esat Bakimli. (2011). *Trade among OIC Countries: Limits of Islamic Solidarity. Insight Turkey* Vol.13/ No.2 / 2011 pp. 145-170.
- Apriantono, Anton. (2007). *Prospek dan tantangan Sektor Pertanian di era Globalisasi*. Pidato Menteri Pertanian

- RI Pada Acara Seminar dan Peluncuran buku 35 Tahun PT. Agricon, 17 April 2007.
- Asian Development Bank (ADB). (2011). *Asia 2050: Realizing the Asian Century*. ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2013). Statistik Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing Langsung Berdasarkan Negara. Jakarta.
- Estes, Richard J. and Tiliouine, Habib. (2014). Development Trends in Islamic Societies: From Collective Wishes to Concerted Actions. *Social Indicators Research Journal* 116.1. (Mar 2014) pp. 67-114.
- General Secretariat of Organisation of the Islamic Conference. (1991). *Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of The Organization of The Islamic Conference*. Jeddah.
- Ghani, Ghairuzazmi M. (2011). The Impact of Trade Liberalization on the Economic Performance of OIC Member Countries. *Journal of Economic Cooperation and Development* Vol. 32-1 (2011).
- Gurler Oker. (2000). Blocs in Islamic Common Market-Role and Function Of Regional Blocs And Arrangement In The Formation Of The Islamic Common Market. *Journal of Economic Cooperation* 21, 4 (2000) Page 1-28.
- Hasan, M. Kabir. (2002). *An Empirical Investigation of Economic Cooperation among The OIC Member Countries*. Economic Research Forum (ERF) Working Paper Series 200212. Cairo, Egypt.
- Hertel, Thomas W dan Tsigas, Marinos, E. (1997). *Structure of GTAP*, dalam Hertel, Thomas W (ed)., *Global Trade Analysis: Modeling and Applications*. Cambridge University Press.
- Hossain, Md Zakir, et.al. (2005). Econometric Analysis of Marketing Potential of OIC Countries: Some Facts under Global Economy. *Managerial Auditing Journal*; 2005; 20, 2; ABI/INFORM Global pp. 198-207.
- Hossain Ishtiaq. (2012). The Organisation of Islamic Conference (OIC): Nature, Role and The Issues. *Journal of Third World Studies*; Spring 2012; 29, 1; ProQuest Research Library. pg. 287.
- International Monetary Fund (IMF). (2013a). World Economic Outlook Database 2013. Washington DC.
- International Monetary Fund (IMF). (2013b). *Regional Economic Outlook Update-Middle East and North Africa: Defining the Road Ahead*. May 2013. Washington DC.
- Jafari, Yaghoob, Mohd Adib Ismail and Morteza Sadegh Kouhestani. (2011). Determinants of Trade Flows among D8 Countries: Evidence from the Gravity Model. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 32, 3 (2011), Page 21-3.
- Karam, Sina. (2014). Socio-Economic Development And Muslim Countries' Islamic Solidarity Through Globalization; (A Comparative Study Of 51 Countries of the Muslim World, Including Iran, 2006-2005), Kuwait Chapter of *Arabian*

- Journal of Business and Management Review* Vol. 3, No.6; Feb. 2014
- Kliman, Daniel M. and Richard Fontaine. (2012). *Global Swing States Brazil, India, Indonesia, Turkey and the Future of International Order*. The German Marshall Fund of the United States.
- Lotze, Hermann. (1998). Integration And Transition on European Agricultural and Food Markets: Policy Reform, European Union Enlargement, and Foreign Direct Investment - Four Essays in Applied Partial and General Equilibrium Modeling -. Disertasi doctor rerum agriculturarum di Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin
- Narayanan, G., Badri, Angel Aguiar and Robert McDougall, Eds. (2012). *Global Trade, Assistance, and Production: The GTAP 8 Data Base*, Center for Global Trade Analysis, Purdue University
- Soekarni, M., Hidayat, Agus S., Suryanto, Joko. (2010). Peta Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia.
- Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol. 18 No. 1 Hal 1-20. Pusat Penelitian Ekonomi- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Temporal, Paul. (2011). *Islamic Branding and Marketing*. John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd., Singapore.
- UEA Embassy in Indonesia. *Hubungan Uni Emirat Arab-Indonesia*. Didownload dari www.uaeembassyjakarta.org pada 20 September 2013.
- United Nations Comtrade Data Base. (2013) Indonesia's Export and Import 2000-2012. <http://comtrade.un.org>
- World Economic Forum. (2013). *The Global Competitiveness Report 2013–2014*. Geneva. www.weforum.org. Diunduh pada September 2013.
- World Bank. (2013). *Doing Business 2013*. Washington DC.
- World Trade Organization (WTO). (2013). Understanding The WTO: The Organization, Members and Observers. Didownload dari https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, diakses Pada Juni 2013.